

## ***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN HUMAN TRAFFICKING DI KEPULAUAN RIAU***

**Oleh**  
**Innosensius Ramon Almer Bala Aran**  
**Nim.180565201051**

### **Abstrak**

Keamanan Internasional bukan semata – mata hanya berbicara mengenai keamanan wilayah, kedaulatan dalam memimpin, berdiplomasi secara aman dan lain – lain. Namun ada hal yang sangat sarat terkadang ditinggalkan oleh sebagian negara, yakni kemaslahatan dari komponen negaranya yakni warga negara. Lantas berbicara warga negara pastinya hal – hal yang patutnya terpenuhi baik sandang, pangan hingga papan. Tidak heran banyak cara yang dilakukan mereka untuk memenuhi hal tersebut. Merujuk dari perilaku tersebut peneliti mencoba mengkaji suatu permasalahan yang kadang sarat akan keanggunan hak – hak manusia, yakni perdagangan orang atau yang dikenal dengan (*Human Trafficking*). Perdagangan manusia dapat dibedakan atas tiga bentuk, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbananya, dan berdasarkan bentuk eksplotasinya. Dengan berbekal pengetahuan yang minim, kurangnya tempat pekerjaan , krisis ekonomi, dan budaya merupakan pendorong terjadinya kejahatan tersebut. Tidak heran Perdagangan orang marak dan terkadang sadar maupun tidak, terjadi di tengah – tengah kita. Kota Tanjungpinang dan Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah primadona, bagi mereka yang memilih jalur singkat untuk mengadu nasib guna pemenuhan kebutuhannya. Terlepas dari itu dua wilayah ini merupakan portal masuk dan keluarnya dengan mudah, sehingga kejahatan TPPO sangat marak terjadi di daerah ini. Berdasarkan laporan Polisi Daerah Kepulauan Riau dari tahun 2017 – 2020 kasus TPPO terus mengalami kenaikan. Maka dari itu Peneliti mencoba mengkaji bagaimana Kolaborasi yang terjadi guna mencegah permasalahan *Human Trafficking* di Kepulauan Riau(Kepri). Dari hasil tersebut peneliti menemukan sudah adanya suatu wadah yang difasilitasi melalui pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang(GT PP TPPO). Namun masih adanya *Ego Sektoral* dan bahkan ketidak transparansi dalam penyediaan data. Terlepas dari itu masih kurangnya keseriusan dalam menangani permasalahan *Human Trafficking* ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya masih minimnya dan tidak terlaksananya Kolaborasi di pemerintahan Kepulauan Riau , dalam pencegahan *Human Trafficking* di Kepulauan Riau.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia, GT PP TPPO, *Collaborative Governance*

**COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE PREVENTION OF HUMAN  
TRAFFICKING IN RIAU ISLANDS**

*By  
Innosensius Ramon Almer Bala Aran  
Nim.180565201051*

*Abstract*

*International Security is not just talking about territorial security, sovereignty in leading, diplomacy safely and others. However, there is something that is very loaded with sometimes abandoned by some countries, namely the benefit of the components of the country, namely citizens. Then talking to citizens, of course, things that should be fulfilled, both clothing, food and boards. No wonder there are many ways they do to fulfill this. Referring to this behavior, researchers try to examine a problem that is sometimes full of the elegance of human rights, namely trafficking in persons or known as (Human Trafficking). Human trade can be distinguished from three forms, namely based on the purpose of the man's slice, based on the victim, and based on the form of exploitation. Armed with minimal knowledge, lack of a place to work, economic, and cultural crises are the drivers of the crime. No wonder trafficking is rife and sometimes consciously or unconsciously, occurs in our midst. The cities of Tanjungpinang and Batam, which are located in the Riau Islands Province, are excellent areas, for those who choose a short path to pit their fate to meet their needs. Apart from that, these two areas are easy entry and exit portals, so trafficking crimes are particularly prevalent in these areas. Based on reports from the Riau Islands Regional Police from 2017 – 2020, trafficking cases continued to increase. Therefore, researchers try to examine how collaboration occurs to prevent human trafficking problems in the Riau Islands (Kepri). From these results, researchers found that there was already a forum facilitated through the central government through the Task Force for the Prevention and Enforcement of Trafficking crimes (GT PP PP trafficking). But there is still a Sectoral Ego and even a lack of transparency in the provision of data. Apart from that, there is still a lack of seriousness in dealing with this Human Trafficking problem. Therefore, it can be concluded that there is still a lack and non-implementation of collaboration in the Riau Islands government, in the prevention of Human Trafficking in the Riau Islands.*

*Keywords : Human Trafficking, GT PP TRAFFICKING, Collaborative Governance*